

## DAFTAR PUSTAKA

- Presiden RI, 2002. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Pemberian Izin Apotek*. Jakarta.
- Presiden RI, 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta.
- Presiden RI, 1993. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Pemberian Izin Apotek*. Jakarta.
- Presiden RI, 1992. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Presiden RI, 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta.
- Presiden RI, 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta.
- Presiden RI, 2009. *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Presiden RI, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta.
- Presiden RI, 1990. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek*. Jakarta.
- SE Nomor HK.02.02/Menkes/2/2017 *tentang petunjuk pelaksanaan peraturan menteri kesehatan nomor 31 tahun 2016*. Jakarta.